

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan adalah salah satu bentuk masalah yang muncul dalam kehidupan masyarakat, terutama masyarakat di negara berkembang seperti Indonesia. Indonesia sebagai negara berkembang dan memiliki jumlah penduduk yang besar sehingga tidak dapat terhindar dari masalah kemiskinan tersebut. Berbagai usaha dan kebijakan sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menuntaskan masalah kemiskinan. Mulai dari lingkup daerah, regional dan nasional, akan tetapi hal tersebut belum mampu mengatasi kemiskinan. Di Indonesia salah satu faktor yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan umum adalah dengan mengukur tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan dan kesejahteraan umum memiliki hubungan negatif, semakin rendah tingkat kesejahteraan maka semakin tinggi tingkat kemiskinan begitupun sebaliknya (Puspita, 2015).

Abu Hurairah secara detail menjelaskan bahwa miskin adalah orang yang tidak memiliki sesuatu yang mencukupinya, baik makanan, pakaian maupun tempat tinggal. Seseorang yang diberi sekiranya sedikit untuk menutupi atau memenuhi kebutuhan diri dan keluarga. Mengutip dalam Hadist Bukhari yang secara eksplisit (tegas) menerangkan mengenai kemiskinan yaitu sebagai berikut:

قَالَ: وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ عَنْ عَنَّهُ، اللَّهُ رَضِيَ هُرَيْرَةَ أَبِي عَنْ

النَّاسَ يَسْأَلُ لَا أَوْ وَيَسْتَحْيِي غَنَى لَهُ لَيْسَ الَّذِي الْمُسْكِينُ وَلَكِنْ وَالْأَكْلَتَانِ الْأَكْلَةَ تَرُدُّهُ الَّذِي الْمُسْكِينُ لَيْسَ
إِلْحَافًا

Yang artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal telah menceritakan kepada kami Syu’bah telah menggambarkan kepada saya Muhammad bin Ziad berkata; Aku mendengar Abu Hurairah Radliallahu ‘Anhu dari Nabi Shallallahu ‘alaihiwasallam: ”Bukankah disebut miskin orang yang bisa diatasi dengan satu atau dua suap makanan”. Akan tetapi yang disebut miskin adalah orang yang tidak memiliki kecukupan namun dia menahan diri (malu) atau orang yang tidak meminta-minta secara mendesak (HR. Bukhari No. 1382)”.

Dalam Al-Quran faqir diidentikkan dengan kemiskinan sebagai mana disebut dalam QS. Al-Baqarah [2]:286 yaitu:

غَلِيْمٌ وَاسِعٌ وَاللَّهُ ۖ وَفَضْلًا مِنْهُ مَغْوِرَةٌ يَعْذُكُمُ وَاللَّهُ ۖ بِالْفَحْشَاءِ وَيَأْمُرُكُمُ الْفَقْرَ يَعْذُكُمُ الشَّيْطَانُ

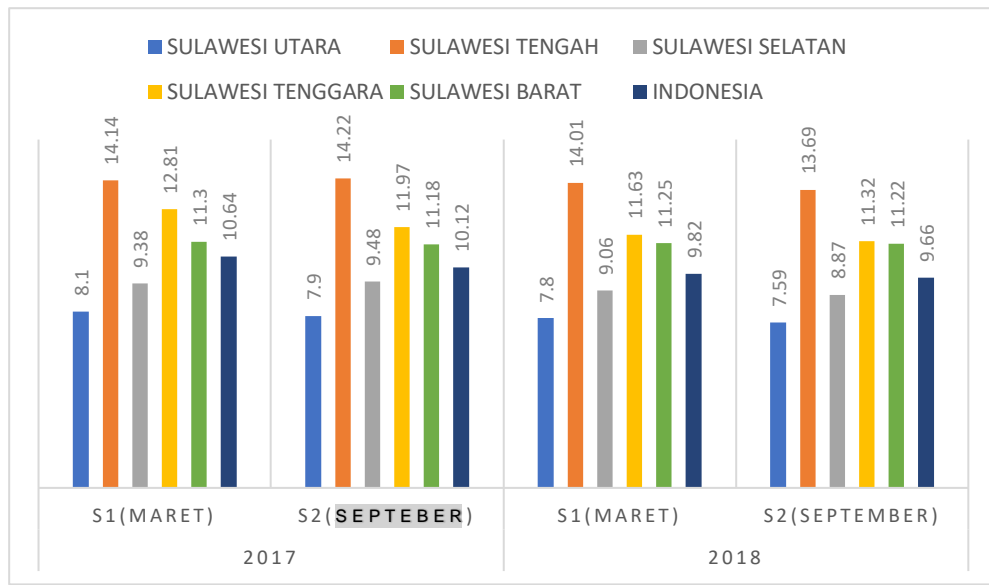
{ ٢٤٨ : البقرة }

Yang artinya:

“Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Provinsi Sulawesi Barat merupakan salah satu daerah di Indonesia yang mengalami permasalahan kemiskinan dan penanggulangan kemiskinan. Angka kemiskinan masi tinggi disetiap Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat membuat daerah ini dilanda permasalahan kemiskinan. Persentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Barat memang tidak setinggi persentase provinsi lain di Indonesia. Namun jika dibandingkan dengan persentase kemiskinan di

Indonesia secara keseluruhan Provinsi Sulawesi Barat masi lebih tinggi. Berikut merupakan data persentase jumlah penduduk miskin di pulau Sulawesi yaitu sebagai berikut:



Sumber: BPS 2019

Gambar 1.2
Kemiskinan di Pulau Sulawesi dan Indonesia

Dari Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa kemiskinan peringkat pertama di Pulau Sulawesi yaitu Provinsi Sulawesi Tengah dengan persentase 14.22% pada semester-2 bulan September tahun 2017. Sedangkan Provinsi Sulawesi Barat berada pada posisi ke-3 (tiga) dengan persentase kemiskinan pada tahun 2018 semester-1 bulan Maret sebesar 11,25% dan semester-2 bulan September sebesar 11,22%. Pada tahun sebelumnya yaitu 2017 persentase penduduk miskin Provinsi Sulawesi Barat semester-1 Maret sebesar 11,3% dan pada semester-2 bulan September sebesar 11,18%. Dengan kata lain, Provinsi Sulawesi Barat mengalami penurunan persentase penduduk miskin yaitu sebesar 0.04% pada tahun 2018. Walaupun demikian tingkat kemiskinan di

Sulawesi Barat setiap tahunnya selalu lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata kemiskinan di Indonesia, yang dapat kita lihat pada gambar di atas rata-rata kemiskinan Indonesia sebesar 9,66% pada semester-2 bulan September. Sehingga hal ini menggambarkan bahwa kemiskinan di Sulawesi Barat sangatlah tinggi.

Tingginya tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan daerah pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan menarik minat peneliti untuk meneliti kemiskinan di Sulawesi Barat. Perlu diketahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingkat kemiskinan untuk menurunkan tingkat kemiskinan sehingga dapat dibuat suatu kebijakan yang efektif guna menurunkan angka kemiskinan di Sulawesi Barat. Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi tingkat kemiskinan di Sulawesi Barat adalah: 1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM); 2) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); 3) Pengangguran.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) suatu indeks yang dilihat dari kualitas fisik dan non fisik penduduk mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar. Adapun tiga bidang tersebut, yaitu: 1) Kesehatan, 2) Tingkat Pendidikan, dan 3) Ekonomi (Sanggелorang *et al.*, 2015).

TABEL Error! Use the Home tab to apply 0 to the text that you want to appear here.1

**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Berdasarkan
Provinsi di Pulau Sulawesi Tahun 2018**

Provinsi	Angka Harapan Hidup (%)	Harapan Lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah	Pengeluaran Riil/Kapita (Ribu Rupiah)	IPM (%)	Peringkat IPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sulawesi Utara	71,26	12,68	9,24	10.731	72,2	1
Sulawesi Tengah	67,78	13,13	8,52	9.488	68,88	4
Sulawesi Selatan	70,08	13,34	8,02	10.814	70,9	2
Sulawesi Tenggara	70,72	13,53	8,69	9.262	70,61	3
Gorontalo	67,45	13,03	7,46	9.839	67,71	5
Sulawesi Barat	64,58	12,9	7,5	9.051	65,1	6
Indonesia	71,2	12,91	8,17	11.059	71,39	1

Sumber: IPM BPS Metode Baru 2019

Angka Harapan Hidup pada tahun 2018 kenaikan tertinggi pada Provinsi Sulawesi Utara sebesar 71,26% dan IPM peringkat pertama dengan nilai IPM sebesar 72,2%. Sulawesi Utara merupakan daerah di Pulau Sulawesi dengan angka IPM lebih tinggi dibandingkan rata-rata IPM Indonesia secara keseluruhan pada tahun 2018. Sedangkan Sulawesi Barat berada pada peringkat enam dengan nilai Angka Harapan Hidup sebesar 64,58% dan nilai IPM sebesar 65,1%. Peningkatan IPM sangat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Sulawesi ditunjukkan pada tabel 1.1 di atas.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan dipakai untuk menilai laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Paska krisis tahun 2008 rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia berada dinilai 5% pertahunnya. Bahkan di tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Indonesia berada

pada angka 5,17%. Provinsi Sulawesi Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Oleh karena itu, melihat dari cepatnya suatu kegiatan ekonomi disebabkan tingginya arus perdagangan barang maupun jasa yang berperang penting dalam transaksi perekonomian di Provinsi Sulawesi Barat. Berikut data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sulawesi Barat tahun 2014-2018 sebagai berikut:

TABEL Error! Use the Home tab to apply 0 to the text that you want to appear here.2

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita di Sulawesi Barat Atas Dasar Harga Konstan dan Atas Dasar Harga Berlaku 2010 dalam Juta Rupiah Tahun 2014-2018

Tahun	PDRB ADHK	PDRB ADHB	Pertumbuhan PDRB (%)
2018	23,00	32,12	6,23
2017	22,05	29,74	6,62
2016	21,07	27,51	6,01
2015	20,25	25,73	7,31
2014	19,23	23,41	8,86

Sumber: BPS Sulawesi Barat 2019

Berdasarkan tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas harga konstan 2010 dan atas dasar harga berlaku di Provinsi Sulawesi Barat mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Dimana pada tahun 2014 PDRB ADHK dan PDRB ADHB masing-masing sebesar 19,23 juta rupiah dan 23,41 juta rupiah serta pertumbuhan sebesar 8,86%. Begitupun ditahun-tahun selanjudnya PDRB ADHK dan PDRB ADHB selalu mengalami kenaikan nilai, hingga pada tahun 2018 memiliki nilai masing 23,00 juta rupiah dan 32,12 juta rupiah dengan pertumbuhan sebesar 6,23%. PDRB Provinsi Sulawesi Barat selalu mengalami

kenaikan baik harga konstan maupun harga berlaku, dimana hal tersebut mempengaruhi perekonomian masyarakat dan perekonomian daerah.

Pengangguran dapat mengakibatkan tingginya tingkat kemiskinan dikarenakan pengangguran akan mengurangi pendapatan masyarakat sehingga mengurangi tingkat kemakmuran masyarakat (Endrayani *and* Dewi, 2016). Pengangguran ditandai dengan rendahnya tingkat pendidikan yang mengakibatkan akses lapangan kerja yang tersedia menjadi terbatas. Selain dari rendahnya pendidikan, pengangguran juga disebabkan karena tidak tersedianya lapangan pekerjaan atau seseorang tidak ingin bekerja dikarenakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan harapan. Berikut merupakan data pengangguran di Provinsi Sulawesi Barat:

TABEL Error! Use the Home tab to apply 0 to the text that you want to appear here.**3**

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sulawesi Barat dan Nasional Tahun Februari-2014-Agustus-2018

Tahun	TPT (%)	
	Sulawesi Barat	Nasional
Februari-2018	2,45	5,13
Agustus-2018	3,16	5,13
Februari-2017	2,98	5,33
Agustus-2017	3,21	5,50
Februari-2016	2,72	5,50
Agustus-2016	3,33	5,61
Februari-2015	1,81	5,81
Agustus-2015	3,35	6,18
Februari-2014	1,60	5,70
Agustus-2014	2,08	5,94

Sumber: BPS Sulawesi Barat 2019

Pada tabel 1.3 di atas Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) periode Februari 2014-Agustus 2018 di Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Perbandingan antara Tingkat Pengangguran

Terbuka Nasional dan Sulawesi Barat, tingkat pengangguran dari tahun 2014-2018 di Sulawesi Barat selalu lebih rendah dari TPT nasional yang ditunjukkan dalam tabel 1.3 di atas.

Ketiga variabel di atas telah diteliti dalam beberapa penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Zuhdiyaty dan Kaluge (2018) dengan judul “Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir (Studi Kasus Pada 33 Provinsi)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kemiskinan dan variabel IPM memiliki hubungan bertolak belakang, artinya ketika nilai IPM turun akan meningkatkan tingkat kemiskinan. Begitu pula sebaliknya jika nilai IPM naik maka akan menurunkan tingkat kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan oleh Dama, Lopian dan Summual (2016) dengan judul penelitian “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Manado (Tahun 2005-2014)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kemiskinan dan variabel PDRB memiliki hubungan yang bertolak belakang, artinya ketika nilai PDRB turun akan meningkatkan tingkat kemiskinan. Begitu pula sebaliknya jika nilai PDRB naik maka akan menurunkan tingkat kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan oleh Margareni, Djayastra dan Yasa (2015) dengan judul penelitian “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Provinsi Bali”. Hasil penelitian menunjukkan variabel pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kemiskinan dan variabel pengangguran memiliki hubungan yang berbanding lurus, artinya ketika nilai pengangguran turun akan menurunkan tingkat kemiskinan. Begitu pula sebaliknya jika nilai pengangguran naik maka akan menaikkan tingkat kemiskinan.

Maka berdasarkan fenomena di atas, peneliti ingin mencoba meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat. Peneliti berasumsi bahwa dengan menurunkan angka pengangguran dan mempercepat pembangunan ekonomi sehingga dapat mengurangi kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat. Oleh karena itu, peneliti membatasi variabel yang dipakai dalam penelitian ini dengan variabel dependen Kemiskinan dan variabel independen adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pengangguran dengan judul penelitian: "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN DI SULAWESI BARAT (2014-2018)".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat?
2. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat?

3. Bagaimana pengaruh pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap variabel tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat.
- b. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap variabel tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat.
- c. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel pengangguran terhadap variabel tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat.

D. Manfaat Penelitian

- a. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk lebih menambah wawasan peneliti tentang Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pengangguran.
- b. Penelitian ini dapat memberi dedikasi terhadap berbagai pihak yang membutuhkan untuk penelitian selanjutnya dengan ruang lingkup yang lebih luas.

- c. Sebagai media informasi bagi masyarakat umum untuk mengetahui pembahasan kemiskinan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan.